

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 352-359
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18130046>

Peran Humas KPU dalam Program Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Pilkada 2024

The Role of the KPU Public Relations in the Voter Education Socialization Program for the 2024 Regional Elections

¹ Hasna Nuha Tsabitah, ² Asri Pratiwi Tenggara, ³Fadhilah Zahrah Based, ⁴ Winda Dwi Astuti Zebua

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Jakarta,

Email: ¹ nuhatsa11@gmail.com, ² asripratiwitenggara@gmail.com, ³ fadhillahzabed@gmail.com

Abstract

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai penyelenggara yang independen dan netral, bertanggung jawab untuk memastikan pemilihan berlangsung secara adil dan demokratis. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU melaksanakan program Sosialisasi Pendidikan Pemilih, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pemilukada, tata cara memilih, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengeksplorasi peran Humas KPU dalam program sosialisasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU telah berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui berbagai strategi komunikasi, termasuk pemanfaatan media sosial dan kegiatan langsung. Meskipun terdapat penurunan partisipasi pemilih dibandingkan dengan pemilihan presiden sebelumnya, program sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam Pemilukada 2024. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur mengenai peran Humas KPU dalam menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya pemilu, khususnya dalam konteks Pemilukada 2024.

Keywords: *Humas; KPU; Sosialisasi; Pendidikan; Pemilih; Partisipas; Persuasi*

Abstrak

The regional head election (Pemilukada) in Indonesia is an important part of the democratic process, which will be held simultaneously on November 27, 2024. This event involves all elements of society in determining regional leaders, including governors, regents, and mayors. The General Election Commission (KPU) plays the role of an independent and neutral organizer, responsible for ensuring that the election is conducted fairly and democratically. In an effort to increase public participation, the KPU implements the Voter Education Socialization program, which aims to provide understanding of the importance of Pemilukada, the voting process, and citizens' responsibilities. This study employs a qualitative approach with library research methods to explore the role of KPU's Public Relations in this socialization program. The findings indicate that the KPU has successfully raised awareness and participation among the public through various communication strategies, including the use of social media and direct activities. Although there has been a decline in voter participation compared to the previous presidential election, this socialization program is expected to strengthen community engagement in the 2024 Pemilukada. This research contributes to the literature on the role of KPU's Public Relations in creating a society that is aware of the importance of elections, particularly in the context of the 2024 Pemilukada

Kata kunci: *Public Relations; KPU; Socialization; Education; Voter; Participation; Percuasion*

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 05 January 2026

PENDAHULUAN

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Dengan diselenggarakannya pemilukada secara serentak pada tanggal 27 November 2024 diseluruh Indonesia, sebagai bagian dari pesta demokrasi yang melibatkan seluruh element masyarakat. Dalam pemilukada ini masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan/memilih kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota).

Pemilihan ini diselenggarakan oleh KPU (komisi pemilihan umum) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam UU 1945. KPU merupakan lembaga negara yang memiliki mandat penuh untuk menyelenggarakan seluruh proses pemilihan umum di Indonesia secara adil, jujur, dan demokratis. KPU memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama proses pemilu (Universitas & Malang, 2018). KPU berperan sebagai penyelenggara yang independen dan netral kemandirian KPU sangat penting untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. (Mursyid & Larissa, 2021). KPU bertindak sebagai wasit dalam perhelatan demokrasi, memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpinnya. Mulai dari pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden, hingga pemilihan kepala daerah di berbagai tingkatan.

Momentum pemilukada ini tentunya menjadi hal yang krusial dan penting untuk proses demokrasi di Indonesia. Selain penyelenggaraan teknis pemilu, tentunya KPU memiliki peran dan tugas untuk mengajak seluruh element masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilukada ini. Hal ini mencakup penyampaian informasi yang jelas, masif, dan mudah di akses oleh masyarakat mengenai tahapan pemilukada, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Untuk terwujudnya tujuan ini, maka KPU dapat memanfaatkan berbagai metode komunikasi baik dengan menggunakan media sosial, atau secara langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kompas.com dijelaskan berdasarkan pemantauan melalui Sirekap (sistem informasi rekapitulasi) KPU RI pada jumat sore, partisipasi pemilih hanya mencapai 68,16 persen dari 98,5 persen data yang masuk. Artinya terjadi penurunan partisipasi pemilih pada pemilukada 2024 yakni kurang dari 70 persen jika dibandingkan dengan pilpres (pemilihan presiden dan wakil presiden) pada february 2024 lalu.

Sebelum proses pemilukada ini dilakukan KPU telah melakukan berbagai upaya untuk mensukseskan pemilukada ini dalam hal ini, humas (Hubungan Masyarakat) KPU mengambil peran penting dalam penyampaian informasi terkait pemilukada kepada masyarakat dengan membuat program *Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada pilkada 2024* dengan pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan di setiap daerah. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilukada, tata cara memilih, serta tanggung jawab mereka sebagai warga negara, meningkatkan kesadaran, kepekaan dan juga partisipasi masyarakat terhadap pemilukada (Muharom & Andiyanari, 2024). Karena salah satu faktor pendukung keberhasilan Pemilukada ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya pada saat pelaksanaan pemilukada (27/11/2024).

Berdasarkan data diatas maka artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran humas KPU dalam program sosialisasi pendidikan pemilih 2024 sebagai salah satu cara untuk menyampaikan informasi pentingnya pemilukada 2024. Berdasarkan studi-studi sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Nugraha pada tahun 2020 dengan judul *Peran Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanggung Selatan Dalam Menyosialisasikan Pemilu 2019 Pada Pemilihan Disabilitas*, penulis menemukan temuan antara lain adalah peran sebagai communicator dengan menjadi narasumber dalam memberikan segala bentuk informasi, sebagai relationship yakni membina hubungan yang positif antar lembaga lain dengan KPU Tangsel, peran back up management dengan mengidentifikasi pemilih disabilitas untuk penyusunan daftar pemilih serta sebagai good image maker dengan selalu menampilkan citra baik dalam segala bentuk informasi di media maupun secara langsung. Penelitian lain yang dilakukan oleh Muharrom, F.A., & Andini, P. (2024) dengan judul *Strategi Humas KPU Kabupaten Magelang dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024*, Hasil penelitian yang didapatkan yaitu strategi humas dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula dengan melakukan program kegiatan sosialisasi di sekolah, masyarakat dan sosial media, menjalankan program komisi pemilihan umum mengajar dan membuat acara lomba sebagai sosialisasi yang menjelaskan asas pemilu, hak dan kewajiban masyarakat dalam partisipasi pemilu.

Meskipun terdapat penelitian sebelumnya yang membahas peran humas KPU, penelitian ini berbeda karena fokus pada bagaimana peran tersebut dijalankan dalam program sosialisasi pendidikan pemilih pada Pilkada serentak 2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait peran humas KPU dalam menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya pemilu, khususnya dalam konteks Pilkada 2024.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penggalan data deskriptif dari berbagai sumber. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara rinci peran Humas KPU dalam program sosialisasi pendidikan pemilih pada Pilkada 2024, termasuk peran tersebut dijalankan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yang menitikberatkan pada analisis bahan-bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Studi pustaka ini dipilih untuk mengeksplorasi strategi komunikasi Humas KPU, kebijakan pendidikan pemilih, serta dampaknya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024. Data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, artikel berita, serta konten daring yang relevan. (Barokah, Maryanah, Darmastuti, & Hertanto, 2022)

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian, seperti strategi komunikasi publik dan kebijakan sosialisasi pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Humas KPU.

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang signifikan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, di mana data yang telah dianalisis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait efektivitas peran Humas KPU dalam program pendidikan pemilih pada Pilkada 2024. Pendekatan sistematis ini membantu memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilukada secara serentak ini tentunya penting untuk pembangunan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan dekomposisi di Indonesia. Dalam hal ini tentunya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk ikut terlibat dalam mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi ini, termasuk dalam pemilukada yang diselenggarakan pada tanggal 27 november 2024.

Mengutip dari Databoks, 2024 presentase pemilih pemula mencapai 56%. Artinya pemilukada ini didominasi oleh pemilih muda yang dapat dipastikan belum memiliki pengalaman mengenai pemilu. Maka dari itu penting bagi humas pemerintah terlibat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan pemilukada ini humas pemerintah diwakili oleh KPU.

Menurut teori humas yang disampaikan oleh Edward Louis James Bernays pemerintah memiliki peran diantaranya: pertama, memberikan penerangan kepada masyarakat. Kedua, melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perilaku secara langsung. Dan yang ketiga, berupaya untuk meningkatkan sikap dan perilaku suatu badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat sebaliknya. (Desa & Desa, 2023)

Berdasarkan dari teori Bernays, humas KPU telah menjalankan peran diantaranya :

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat.

KPU sebagai perwakilan dari humas pemerintah memiliki peran serta fungsi memberikan penerangan kepada masyarakat. Penerangan yang dimaksud dapat berupa penyebaran informasi atau edukasi, dalam menyebarkan informasi ini banyak cara yang dilakukan oleh KPU, misalnya memanfaatkan platform digital sebagai media penyampaian

informasi salah satunya melalui instagram KPU dengan username @Kpu_ri, didalamnya terdapat informasi mengenai pemilu salah satunya peringatan menuju hari pemilihan, apa yang perlu disiapkan ketika ke TPS, lokasi TPS.



Sumber dari Instagram KPU RI

Selain itu, dalam memberikan informasi kepada masyarakat, KPU juga melakukan sosialisasi pendidikan pemilih. Sosialisasi pendidikan pemilih ini dilakukan di berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dengan muatan materi utama yakni pengertian pemilu, pentingnya pemilu, mengapa Indonesia menganut sistem demokrasi, tanggal pelaksanaan pemilu, pentingnya partisipasi, bagaimana tata cara pemilihan, pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu, hingga keterlibatan masyarakat dalam sebagai mengawasi pemilu.

Program Sosialisasi ini dinilai cara yang paling efektif untuk memberikan pencerahan atau edukasi secara langsung kepada masyarakat mengenai kepenguluhan karena banyak masyarakat yang tidak mengenal KPU, tidak mengikuti media-media KPU, bahkan tidak tertarik dengan pemilu ini.

Seperti yang dilakukan oleh KPU JABAR (Jawa Barat) dengan tema Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 yang dilaksanakan di Paung pada Kamis (10/10/2024).

Gambar 1, Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 (kolaborasi dengan Yayasan Sahabat Yatim Duafa Parung)



Sumber Dokumentasi Pribadi

Kemudian yang dilakukan oleh KPU Banten dengan tema Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024, yang di selenggarakan di Cireundeu (FISIP UMJ) pada Jumat (15/11/2024).

Gambar 2. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024



Sumber Dokumentasi Pribadi

Dengan adanya sosialisasi pendidikan pemilih ini diharap masyarakat dapat menjadi tau terkait pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilukada tahun 2024, dan tau apa saja rangkaian dalam pemilukada ini.

2. Melakukan persuasi untuk meningkatkan sikap dan prilaku secara langsung

Fungsi dan peran Humas KPU selanjutnya ialah dengan mempersuasi masyarakat, merubah sikap serta prilaku secara langsung. Sosialisasi pendidikan pemilih ini selain berfungsi sebagai informasi dan edukasi tentunya berfungsi sebagai sarana mempersuasi masyarakat agar dapat berpartisipasi. Karena memang tujuan diadakannya sosialisasi pendidikan pemilih ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilukada 2024. Dalam sosialisasi pendidikan ini dijelaskan urgensi pentingnya partisipasi masyarakat sehingga harapannya masyarakat dapat lebih peduli dan mau terlibat dalam mensukseskan pemilukada 2024 ini.

Karna sosialisasi ini dinilai sebagai cara yang paling efektif untuk memberikan pendidikan serta merubah sikap masyarakat yang awalnya enggan menggunakan hak pilihnya menjadi mau menggunakan hak pilihnya. Mengutip dari Kominfo, Sosialisasi Pendidikan Pemilih ini berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat hingga mencapai 70.6% dimana pada tahun 2018 hanya mencapai 67,39%

Gambar 3. Divisi Sosialisasi; Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim),



Sumber Website Kominfo

Meskipun sekarang sudah serba digital, tetapi sosialisasi pendidikan pemilih ini tetap menjadi satu satunya cara yang paling efektif dan harus tetap dilakukan karna tidak semua masyarakat melek teknologi. Selain itu sosialisasi pendidikan pemilih ini juga dapat menjangkau masyarakat yang acuh terhadap isu isu politik.

Sosialisasi pendidikan pemilih selalu dilaksanakan baik menjelang pemilu kda maupun pilpres, pada pilpres 2024 presentase pemilih mencapai 80 persen, tetapi pada pemilu kda 2024 kurang dari 70 persen, itu artinya terjadi penurunan partisipasi pemilih kurang lebih sekitar 10 persen, sehingga memunculkan pertanyaan seperti, *jika sosialisasi ini selalu dilakukan disetiap pemilu lantas kenapa terjadi penurunan presentase partisipasi pemilih? Apakah sosialisasi tidak relevan lagi? Atau kurang maksimal kah pelaksanaan program sosialisasi ini?*

Selain itu KPU juga berupaya membuat sebuah Film dengan judul *Tepatilah Janji*, lanjutan dari film *Kejarlah Janji* yang tayang pada 2023 lalu. Film ini mengangkat isu politik terkhusus terkait pelaksanaan pemilu kda. Film ini selain dapat menjadi edukasi kepada masyarakat tetapi sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilu kda 2024.

Gambar 4. KPU RI bersama KPU Kaltim mengadakan nobar (nonton bareng) film *Tepatilah Janji* ini di Bioskop XXI Samarinda Square pada senin (2/9/2024)



Sumber Website KPU

3. Berupaya untuk meningkatkan sikap dan prilaku suatu badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat sebaliknya

Fungsi dan peran humas yang terakhir adalah berupaya untuk meningkatkan sikap dan prilaku suatu badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat sebaliknya, melalui program sosialisasi pendidikan pemilih yang bertujuan untuk membangun hubungan timbal balik antara masyarakat, KPU dan penyelenggara pemilu kda sehingga masyarakat mau berpartisipasi.

KPU menetapkan DPT pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih diantaranya, terdapat 66,8 juta pemilih dari generasi milenial dan pemilih dari generasi Z sebanyak 46,8 juta pemilih. (Kurniawan, Erawati, Setiawan, & Harmain, 2023). Artinya, politik terhadap generasi z sangat penting dalam mencerminkan kesadaran akan politik, ketertarikan terhadap isu isu politik, dan respon mereka terhadap masalah sosial (Kurniawan et al., 2023).

Maka dari itu humas KPU melalui program sosialisasi pendidikan pemilih ini menyampaikan edukasi serta ajakan kepada generasi z dengan cara yang digemari oleh generasi Z. Seperti yang dilakukan oleh KPU Sulut yang menggelar Sosialisasi dengan tema Nonton Bareng Film *Tepatilah Janji* yang bertempat di Kampus IAKN Manado pada senin (28/10/2024)



Sumber Website KPU Sulut

SIMPULAN

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024 merupakan momen krusial dalam proses demokrasi di Indonesia. KPU, sebagai penyelenggara pemilu yang independen, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Melalui program Sosialisasi Pendidikan Pemilih, KPU berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilukada, serta memberikan informasi yang jelas mengenai tata cara pemilihan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU telah melaksanakan berbagai strategi komunikasi yang efektif, termasuk pemanfaatan media sosial dan kegiatan langsung, untuk menjangkau masyarakat. Meskipun terdapat penurunan partisipasi pemilih dibandingkan dengan pemilihan presiden sebelumnya, upaya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Pemilukada 2024.

Secara keseluruhan, peran Humas KPU dalam program sosialisasi pendidikan pemilih sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai pemilih. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Pemilukada tidak hanya bergantung pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat yang didorong oleh informasi dan edukasi yang tepat. Dengan demikian, KPU harus terus berinovasi dalam strategi sosialisasi untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk generasi muda, merasa terlibat dan memiliki suara dalam proses demokrasi.

REFERENSI

- Barokah, F., Maryanah, T., Darmastuti, A., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi politik. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 1–13.
<https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>
- Desa, P., & Desa, D. I. (2023). Hubungan masyarakat (humas) sebagai media komunikasi pemerintah desa di Desa Plampang. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(5).
- Kurniawan, M. R., Erawati, D., Setiawan, H., & Harmain, H. (2023). Digitalisasi: Strategi komunikasi KPU dalam meningkatkan partisipasi Gen Z pada Pemilu 2024. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(6), 1375–1390.
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6206>
- Muharom, F. A., & Andiyansari, P. (2024). Strategi humas KPU Kabupaten Magelang dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024. *Communique: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 6(2).
www.ejurnal.stikpmedan.ac.id

- Mursyid, S., & Larissa, D. (2021). Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Bulukumba: Perspektif siyasah syar'iah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2, 442–453.
- Universitas Muhammadiyah Malang, & Fkip. (2018). Analisis dampak pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di SMAN 1 Balauring, Lembata, NTT. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 128(November), 128–137.